

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana yang sudah diuraikan berdasarkan analisis terhadap proses politisasi rekrutmen perangkat desa dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penjarangan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya sesuai karena pembentukan panitia penjarangan dan penyaringan perangkat desa (P3D) tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016, kemudian kurangnya transparansi dalam pemberitahuan nilai hasil tes komputer yang memudahkan kepala desa merubah nilai dan rangkingnya, serta praktik nepotisme yang dibiarkan oleh P3D dan BPD yang merupakan klien kepala desa. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya birokrasi patron-klien dalam proses rekrutmen perangkat desa.

Praktek politisasi birokrasi dalam proses rekrutmen perangkat desa dapat dipahami sebagai pola patron klien. Kepala desa yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi bertindak sebagai patron mempengaruhi BPD dan P3D yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah sebagai klien yang seharusnya memberikan pelayanan yang sama kepada semua peserta rekrutmen. Namun membiarkan kepala desa mengutamakan keluarganya, ini menunjukkan BPD dan P3D sebagai klien berada dalam kendali kepala desa sebagai patron. Hal ini menunjukkan adanya polittik patron-klien dalam rekrutmen perangkat desa di Banyumas. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh JC-Scot yaitu patronase hubungan antara seseorang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron), yang mempengaruhi

orang dengan status sosial dan ekonomi yang lebih rendah (klien) karena mereka seharusnya memberikan layanan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan birokrasi patron klien yang ditunjukkan oleh para elit politik desa yaitu kepala desa sebagai patron, P3D dan BPD sebagai klien dan menghasilkan perangkat desa yang menjadi klien kepala desa juga. Budaya patron klien menjadi salah satu penyebab keberpihakan birokrat. Demokrasi dalam hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, ada politisasi birokrasi patron klien yang mengacu pada terjadinya praktik penyimpangan demokrasi, dimulai dari pembentukan panitia rekrutmen perangkat desa hingga menghasilkan perangkat desa baru. Hasil ini menunjukkan bahwa di era sekarang politisasi birokrasi masih terjadi dengan berbagai model dan bentuk.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai masukan yang dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut antara lain yaitu

1. Kepala desa hendaknya lebih bersikap terbuka dan demokratis di dalam menjalankan pemerintahan desa khususnya dalam melakukan pembentukan panitia rekrutmen agar semua elemen lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dapat masuk menjadi panitia dan terlibat secara aktif baik dalam pembentukan panitia maupun dalam menjadi panitia melaksanakan kegiatan rekrutmen perangkat desa.
2. Pihak desa dan panitia P3D hendaknya melakukan inovasi di dalam mekanisme penyaringan perangkat desa khususnya dalam tes seleksi perangkat desa agar dapat memuaskan semua pihak khususnya peserta rekrutmen perangkat desa.